

Pendampingan Pengelolaan Keuangan Publik dan Eksplorasi Desa Tematik serta Peninjauan Potensi Pengelolaan Sampah Organik Bernilai Ekonomis

Suwarno¹, Bambang Pamungkas², Aang Munawar³, Mumuh Mulyana⁴, Ani Mekaniwati⁵, Budi Setiawan⁶
Tarida Marlin Surya M⁷, Sutarti⁸, Sudradjat⁹, Annaria Magdalena M¹⁰
Dwi Maulina¹¹, Indra Bayu Permana¹²

^{1,8,9,12)} Program Studi Akuntansi, ²⁾ Program Studi Magister Akuntansi
³⁾ Program Studi Perbankan dan Keuangan, ^{4,5)} Program Studi Biokewirausahaan
^{6,10)} Program Studi Manajemen, ⁷⁾ Program Studi Pariwisata, ¹¹⁾ Sarjana Manajemen
Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor, Indonesia

Email: suwarno@ibik.ac.id

Abstrak — Saat ini desa menjadi fokus utama pembangunan negara, dengan pengelolaan dana desa menjadi isu krusial. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan tujuan negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Desa Mandiri diartikan sebagai desa maju yang mampu memimpin pembangunan dengan memperhatikan ketahanan ekonomi dan ekologi. Pentingnya pengelolaan keuangan desa yang baik dan kemandirian desa menjadi kunci untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi desa melibatkan pengelolaan data yang kompleks, sumber daya yang terbatas, dan perubahan budaya organisasi. Penggunaan teknologi, sistem pengelolaan keuangan publik yang efisien, pelatihan, dan partisipasi organisasi masyarakat sipil diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan berkolaborasi dengan pemerintah daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, untuk meningkatkan wawasan terkait pengelolaan keuangan publik dan mengembangkan potensi desa. Tim PkM IBIK memberikan solusi berupa (1) pendampingan mengenai pengelolaan keuangan publik yang akuntabel, dan (2) sosialisasi aplikasi Desa Sistematis & Terintegrasi (DE Siti). Mitra diajak melakukan peninjauan lapangan Desa Tematik Kampung Perca, dan pengelolaan sampah organik (Bank Sampah Unit Siliwangi).

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Publik, Peninjauan lapangan, Desa Mandiri, Pembangunan Desa, Tanah Bumbu

Abstract — Villages are the main focus of state development, with managing village funds becoming a crucial issue. Law Number 6 of 2014 concerning Villages sets the state's goal to protect and empower villages to become firm, advanced, independent, and democratic. An Independent Village is a developed village that can lead development by paying attention to economic and ecological resilience. Good village financial management and village independence are crucial to improving the community's economy. Villages' main challenges involve managing complex data, limited resources, and changing organizational culture. The use of technology, efficient public financial management systems, training, and participation of civil society organizations are proposed as solutions to overcome these challenges. The Kesatuan Business and Informatics Institute is collaborating with the local government of Tanah Bumbu, South Kalimantan, to increase insight regarding public financial management and develop village potential. The IBIK PkM team provides solutions in the form of (1) assistance regarding accountable public financial management, and (2) socialization of the Systematic & Integrated Village (DE Siti) application. Partners were invited to conduct a field visit to The Thematic Perca Village and organic waste management (Siliwangi Waste Bank Unit).

Keywords — Public Financial Management, Field Observations, Independent Villages, Village Development, Tanah Bumbu

1. PENDAHULUAN

Saat ini desa menjadi salah satu prioritas pembangunan negara [1]. Dalam pemerintahan desa, pengelolaan dana desa menjadi isu yang krusial dan selalu mendapatkan perhatian yang lebih, mengingat dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan desa [2]. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa tujuan disalurkannya dana desa merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis [1]. Desa

Mandiri adalah desa maju yang mampu menjalankan inisiatif pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa sebanyak mungkin, dengan memperhatikan ketahanan ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan [3]. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disampaikan kebijakan oleh pemerintah pusat bahwa setiap desa akan mendapatkan alokasi dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan APBD Kabupaten [4]. Dana desa dialokasikan dengan memperhatikan pemerataan

dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Perkembangan Dana Desa periode 2019-2023 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,04 persen, dari Rp 69.814,1 miliar pada tahun 2019, menjadi Rp 69.930,0 miliar pada prospek tahun 2023 [5].

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamankan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa [6]. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa [6].

Pengelolaan keuangan publik adalah elemen sentral dari berfungsinya administrasi, yang mendasari semua kegiatan pemerintah. Hal ini mencakup mekanisme di mana sumber daya publik dikumpulkan, dialokasikan, dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan [7]. Dengan demikian, proses pengelolaan keuangan publik mencakup seluruh siklus anggaran, pengadaan publik, praktik audit, dan pengumpulan pendapatan. Pengelolaan keuangan publik yang sehat, transparan dan akuntabel merupakan pilar utama reformasi pemerintahan dan sangat penting untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, serta untuk menciptakan dan memelihara kondisi ekonomi dan sosial yang adil dan berkelanjutan di suatu negara [7]. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pejabat pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam mengelola sumber daya publik. Transparansi mengacu pada ketersediaan informasi tentang bagaimana dana publik digunakan [8]. Akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan program pemerintah memberikan hasil yang diinginkan. Namun, mencapai akuntabilitas dan transparansi dapat menjadi suatu tantangan, mengingat kompleksitas proses pengelolaan keuangan publik [8].

Dengan adanya alokasi dana desa yang telah disediakan, diharapkan terwujudnya upaya pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang mengalami keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan [9]. Pengelolaan keuangan desa yang baik sangat diperlukan dalam mengembangkan serta mengoptimalkan potensi yang ada di desa [4]. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa harus mempunyai komitmen agar masyarakat dapat berdaya guna, mempunyai kemampuan, mandiri untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa sekitarnya [10].

Kemajuan dan kemandirian desa sangat

bergantung pada sejauh mana pemerintah desa mampu bekerja sama dengan kelembagaan desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi desa. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, serta kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat desa [3].

Terkait dengan hal tersebut, pemberdayaan masyarakat biasanya dapat dikaitkan dengan kesiapan masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan [11]. Dalam konsep pemberdayaan, masyarakat tidak hanya sekedar sebagai objek pembangunan, namun juga sebagai objek yang dapat menyukseskan pelaksanaan pembangunan [12]. Jadi kegiatan pengembangan potensi desa yang bertumpu pada aspek pemberdayaan akan berkaitan dengan permasalahan sosial budaya yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Upaya mempersatu pemberdayaan masyarakat di suatu daerah biasanya diperkuat dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat yang menciptakan keharmonisan yang menjadi nilai kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat setempat [11].

Hal yang perlu diperhatikan dalam lingkup pembangunan daerah antara lain adalah pengembangan potensi lokal, yaitu seluruh kegiatan pembangunan yang bersifat sektoral, regional, dan khusus yang terjadi di daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Tujuannya adalah peran masyarakat dalam meningkatkan pemanfaatan potensi daerah, meningkatkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antar daerah, serta mempercepat pertumbuhan daerah dan meningkatkan perekonomian daerah [11].

Banyak desa yang mengalami kebingungan tentang darimana mereka harus memulai menggunakan dana desa untuk proses pembangunan desa. Tantangan yang kerap dihadapi oleh desa mencakup bidang pengembangan ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam, bahkan infrastruktur [13]. Pemerintah desa menghadapi hambatan atau kesulitan dalam manajemen data yang saat ini melibatkan volume yang lebih besar dan seringkali dilakukan dengan sumber daya yang lebih terbatas serta anggaran yang lebih minim jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Lebih jauh lagi, mengubah budaya dalam suatu organisasi dapat menjadi sebuah tantangan, terutama jika terdapat penolakan terhadap perubahan dari proses pengelolaan keuangan tradisional yang berbasis kertas [8]. Tantangan-tantangan ini dapat dikurangi atau diatasi dengan menggunakan teknologi, menerapkan sistem pengelolaan keuangan publik yang ramah pengguna dan efisien, memastikan dukungan perubahan budaya melalui pelatihan menyeluruh, dan melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan keuangan publik yang efektif dapat menjadi lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi modern [8].

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan terkait pengelolaan akuntan publik dengan memanfaatkan teknologi serta menambah pengetahuan untuk mengembangkan potensi desa di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni tanggal 18-19 Oktober 2023. Sasaran kegiatan ini adalah Kepala Desa dan Camat Pemerintah Daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan sebanyak 50 Orang. Solusi yang ditawarkan ialah melakukan pendampingan mengenai pengelolaan keuangan publik yang akuntabel, melakukan sosialisasi mengenai aplikasi DE Siti (Desa Sistemik & Terintegrasi), berkolaborasi dengan Wellmagic. Kegiatan juga melibatkan kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi contoh yang bersesuaian dengan kebutuhan pengembangan wilayah mitra.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan memberikan pendampingan mengenai pengelolaan keuangan publik yang akuntabel (Gambar 1). Tim pengusul juga telah melaksanakan sosialisasi aplikasi DE Siti, dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada Camat dan Kades mengenai sistem desa terintegrasi guna menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan (Gambar 2). Terdapat banyak manfaat menggunakan aplikasi DE Siti, termasuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan visibilitas dan transparansi pengambilan keputusan, data yang terintegrasi serta meningkatkan disiplin fiskal [8]. Penggunaan aplikasi DE Siti yang efektif membantu mengurangi kesalahan manusia yang tidak disengaja dan aktivitas penipuan yang disengaja. Hal ini pada gilirannya mengurangi korupsi dan memaksimalkan transparansi dan akuntabilitas.

Guna terwujudnya upaya pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang mengalami keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan di Pemkab. Tanah Bumbu, maka IBI Kesatuan mengajak para Camat dan Kades untuk melakukan peninjauan lapangan Desa Tematik Kampung Perca (Gambar 3). Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran integral tentang konsep pengembangan potensi desa yang telah menunjukkan keberhasilan.

Pemerintah Tanah Bumbu memiliki potensi untuk mengembangkan sumber daya desa melalui kegiatan budidaya maggot seperti yang sudah diterapkan pada wilayah Sukamulya, Bogor. Untuk memberikan gambaran pengelolaannya, mitra juga diajak untuk melakukan kunjungan lapangan ke Bank Sampah Unit Siliwangi (Gambar 4). Kegiatan kunjungan lapangan memberikan gambaran nyata tentang keberhasilan pengelolaan potensi desa dan bisa menginspirasi mitra untuk penerapan di wilayahnya masing-masing.



Gambar 1. Pendampingan pengelolaan keuangan publik yang akuntabel



Gambar 2. Sosialisasi aplikasi DE Siti



Gambar 3. Tinjauan lapangan di Kampung Perca, Bogor



Gambar 4. Tinjauan lapangan Di Bank Sampah Unit Siliwangi

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan menunjukkan upaya meningkatkan wawasan pengelolaan keuangan publik dengan memanfaatkan teknologi. Solusi yang ditawarkan melibatkan pendampingan, sosialisasi aplikasi DE Siti, dan peninjauan lapangan untuk mendukung pengembangan potensi desa di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kegiatan telah berjalan dengan baik dan direspon mitra secara baik pula.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Inspektorat Pemkab Tanah Bumbu dan Wellmagic yang telah memberikan dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih kepada mitra IBI Kesatuan yakni Kampung Perca dan Bank Sampah Unit Siliwangi. Terima kasih kepada peserta pendampingan yakni Camat dan Kades Pemkab. Tanah Bumbu. Ucapan

terimakasih kami sampaikan kepada civitas akademika IBI kesatuan dan Tim PkM yang telah terlibat dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Masterplandes.com, “Memulai Identifikasi Potensi dan Masalah yang ada di Desa,” Masterplandes.com. [Online]. Available: [https://www.masterplandes.com/penataan-desa/memulai-identifikasi-potensi-dan-masalah-yang-ada-di-desa/](https://www.masterplandes.com/penataan-desa/memulai-identifikasi-potensi-dan-masalah-yang-ada-di-des/)
- [2] M. Muhtar, N. Hamidi, and A. D. Susanti, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Mendorong Kemajuan Pemerintahan Desa,” *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 1, pp. 46–53, 2022, doi: 10.29040/budimas.v4i1.3903.
- [3] pemberdayaan.kulonprogokab.go.id, “Evaluasi Perkembangan Desa,” pemberdayaan.kulonprogokab.go.id. [Online]. Available: <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detail/933/evaluasi-perkembangan-desa>
- [4] Y. L. Br Sitepu, E. Siahaan, and A. M. D. Sitohang, “Accountability of Village Financial Management in Thematic Tourism Villages,” *International Journal of Business and Applied Economics*, vol. 2, no. 4, pp. 685–694, 2023, doi: 10.55927/ijbae.v2i4.5285.
- [5] S. Suparman, “Village funds; a form of state appreciation for villages,” thejakartapost.com. [Online]. Available: <https://www.thejakartapost.com/business/2023/10/05/village-funds-a-form-of-state-appreciation-for-villages.html>
- [6] I. Irban, “Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2023 Tahap I Pada Desa Mendiro Kecamatan Ngombol,” inspektorat.purworejokab.go.id. [Online]. Available: <https://inspektorat.purworejokab.go.id/baru/pendampingan-pengelolaan-keuangan-desa-tahun-2023-tahap-i-pada-desa-mendiro-kecamatan-ngombol>
- [7] knowledgehub.transparency.org, “Public Financial Management,” knowledgehub.transparency.org. [Online]. Available: <https://knowledgehub.transparency.org/topics/public-financial-management-parent-label>
- [8] Freebalance.com, “Showcasing Good Public Financial Management,” Freebalance.com. [Online]. Available: <https://freebalance.com/en/blog/public-financial-management/public-financialmanagement/showcasing-good-public-financial-management/>
- [9] A. Yurita, “Peran Alokasi Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Desa,” djpb.kemenkeu.go.id. [Online]. Available: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung/id/data-publikasi/artikel/3084-peran-alokasi-dana-desa-sebagai-upaya-peningkatan-daya-saing-desa.html>
- [10] K. Endah, “Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 6, no. 1, pp. 135–143, 2020.
- [11] D. R. N. Rachman, A. Roziqin, and S. Salahudin, “Community Empowerment Based On Local Potential: A Systematic Literature Review,” *DiA: Jurnal Administrasi Publik*, vol. 20, no. 1, 2022.
- [12] A. R. Nugraha, S. Perbawasari, F. Zubair, and E. Novianti, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Komunikasi Efektif Berbasis Potensi Wisata dan Kearifan Lokal,” *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, vol. 3, no. 1, p. 123, 2019, doi: 10.30595/jppm.v3i1.3546.
- [13] Inata.co.id, “Melihat Permasalahan menjadi Potensi Desa,” inata.co.id. [Online]. Available: <https://inata.co.id/mediainata/melihat-permasalahan-menjadi-potensi-desa>